

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia dan Australia merupakan dua negara yang saling berdekatan secara geografis. Kedua negara memiliki hubungan bilateral yang sudah terjalin cukup lama. Hubungan bilateral tersebut sudah terjalin sejak 1969 ketika Indonesia di pimpin oleh Presiden Soeharto, sementara Australia di pimpin oleh Perdana Menteri Paul Keating. Dinamika hubungan kedua negara cenderung fluktuatif. Kondisi fluktuatif tersebut terjadi akibat perbedaan persepsi atas suatu isu yang dihadapi oleh kedua negara. Perbedaan persepsi tersebut tidak jarang menimbulkan respon yang saling bertolak belakang, sehingga menyebabkan dinamika hubungan kedua negara menjadi pasang surut. Terdapat beberapa kali hubungan kedua negara berada pada fase terendah dan beberapa kali pula kedua negara bekerjasama dengan sangat harmonis (Dugis, 2015, hal. 309).

Karakter hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia cukup fluktuatif, hal tersebut tidak jarang menimbulkan permasalahan yang bersifat politis. Mulai dari penyadapan yang dilakukan oleh intelejen Australia kepada sejumlah pejabat di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya pelanggaran teritorial yang dilakukan Australia terhadap pemulangan imigran ke perairan Indonesia tanpa melalui koordinasi. Kemudian pemutusan hukuman mati bagi warga negara Australia di Indonesia akibat penderaan

narkotika di Indonesia pada periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) Beberapa isu tersebut membentuk hubungan bilateral Indonesia dan Australia identik dengan pola *Amity* dan *Enmity* (kerjasama dan perselisihan) (Setyawati & Agussalim, 2015, hal. 115). Pola ini menerangkan bahwa dinamika hubungan suatu negara memiliki kecenderungan untuk bekerjasama namun pada fase-fase tertentu tidak menutup kemungkinan bahwa kerjasama sulit terjadi dan menimbulkan perselisihan.

Dinamika hubungan kedua negara ini kemudian menjadi perhatian atas kerjasama yang hendak dilakukan. Dinamika tersebut digambarkan melalui fase-fase terendah maupaun tertinggi yang bisa dicapai oleh kedua negara. Fase terendah hubungan kedua negara terjadi ketika klaim Australia atas Irian Barat. Pada isu Irian Barat, Australia mengklaim bahwa Irian Barat merupakan bagian integral dari kawasan Pasifik. Sehingga hal ini membuat Australia perlu untuk memegang kendali atas Irian Barat. Kemudian fase terendah lainnya adalah ketika sengketa Timor Timur pada akhir tahun 1990an. Australia pada saat itu memeberikan dukungan terhadap kemerdekaan Timor Timur (Alfin, 2018, hal. 8). Fase tertinggi dalam hubungan bilateral kedua negara bermula pada masa kepemimpinan Presiden Suharto dan Perdana Menteri Paul Keating, Indonesia dan Australia berusaha mempertegas hubungan bilateralnya dengan membentuk sejumlah kerjasama yang diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi kedua negara. keuntungan tersebut berupa terjaminnya kedaulatan dan keamanan kedua negara. Pada tahun 1995, Indonesia dan Australia sepakat untuk menandatangani Perjanjian Indonesia-Australia terkait isu-isu keamanan (The Coversation, 2018).

Kerjasama antara Indonesia dan Australia yang dibentuk pada 1995 dikenal dengan *Australia-Indonesia Security Agreement*. Kerjasama ini menandakan dimulainya hubungan bilateral kedua negara (Dupont, 1996, hal. 51). *Australia-Indonesia Security Agreement* merupakan kerjasama kedua negara yang mencakup aspek keamanan. Kerjasama ini tidak dimaksudkan untuk menghadapi negara tertentu, tetapi murni untuk saling mendukung keamanan bersama kedua negara. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari aspek geografis kedua negara. Australia melihat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang patut dipertimbangkan untuk membantu keamanan Australia dari ancaman tradisional maupun non-tradisional (Dupont, 1996, hal. 52).

Indonesia dan Australia cukup banyak melakukan kerjasama dibidang pertahanan dan keamanan. Kondisi geografis yang terpisahkan oleh laut, serta posisi Indonesia yang berada pada posisi silang dunia membuat beberapa kemungkinan akan ancaman keamanan, baik secara tradisional ataupun non-tradisional bagi Australia menjadi terbuka. Hal ini membuat Australia cukup berhati-hati, sebab kawasan Asia Tenggara dengan Indonesia sebagai sentral pada kawasan tersebut merupakan orientasi dari agenda politik dan ekonomi Australia hingga saat ini. Kerjasama pertahanan dan keamanan oleh kedua negara bermula pada serangan Bom Bali I yang terjadi pada tahun 2002. Pasca peristiwa terror tersebut, Indonesia dan Australia sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam hal menanggulangi ancaman terror (Sakti, 2016, hal. 101). Seiring dengan perkembangan dinamika global, pada tahun 2006 kedua negara resmi menandatangani kemitraan pertama mereka pada bidang pertahanan dan keamanan.

Kemitraan tersebut dikenal dengan Traktat Lombok. Traktat Lombok merupakan kemitraan pertama kedua negara yang dibentuk atas dasar kepentingan bersama yang menyangkut aspek keamanan (Sakti, 2016, hal. 101). Indonesia sendiri meratifikasi Traktat Lombok tersebut kedalam Undang-Undang negara. Undang-undang Nomor 47 tahun 2007 Tentang Pengesahan Perjanjian Kerjasama antara Republik Indonesia dan Australia di Bidang Keamanan merupakan pondasi awal dari berbagai kerjasama yang akan dibentuk setelahnya oleh kedua negara.

Kedua negara terus meningkatkan hubungan bilateralnya hingga pada tataran kemitraan strategis. Pada tahun 2018, kedua negara sepakat untuk meningkatkan statusnya menjadi kemitraan strategis-komprehensif. Kemitraan strategis-komprehensif tersebut dikenal dengan *Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership* atau IA-CSP. Dalam IA-CSP ini kedua negara bekerjasama pada lima pilar strategis. Kelima pilar tersebut adalah pilar ekonomi, *people to people*, keamanan dan kepentingan bersama, keamanan maritim, dan yang terakhir adalah stabilitas dan kesejahteraan Indo-Pasifik (Departement of Foreign Affairs and trade, 2018).

IA-CSP yang dijalin oleh kedua negara merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan global maupun regional yang saat ini tengah berkembang. Tantangan terkait stabilitas keamanan hingga ekonomi menjadi alasan utama mengapa Indonesia dan Australia meresmikan IA-CSP. Namun, IA-CSP yang sudah berjalan sekitar empat tahun tersebut masih belum memberikan sumbangsih yang signifikan bagi hubungan bilateral kedua negara. Sebaliknya, IA-CSP justru

mendapat tantangan ketika Australia meresmikan aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat dan Inggris yang dikenal dengan AUKUS.

Pada 15 September 2021, Australia bersama dengan AS dan Inggris sepakat untuk membentuk aliansi pertahanan AUKUS. AUKUS merupakan akronim dari *Australia-United Kingdom-United States*. Aliansi pertahanan trilateral ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas militer Australia sekaligus mengimbangi agresivitas China. Pembentukan aliansi pertahanan trilateral antara ketiga negara tersebut didasari pada stabilitas kawasan Indo-Pasifik yang semakin sulit untuk di kelola dengan adanya rivalitas kekuatan besar antara AS dan China. Kepentingan ketiga negara untuk memperoleh sekaligus mempertegas posisi mereka untuk mengelola stabilitas di Indo-Pasifik menjadi tujuan utama dari pembentukan aliansi pertahanan AUKUS ini (Prime Minister Australia, 2021a).

Faktor instabilitas kawasan Indo-Pasifik mendorong Australia, AS dan Inggris untuk membentuk aliansi pertahanan ini. Selain itu, Meningkatnya kapabilitas China dari segi ekonomi dan militer telah memberikan kekhawatiran negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Kekhawatiran tersebut timbul dari sikap agresif China di kawasan Indo-Pasifik. Salah satunya adalah agresivitas di Laut China Selatan (Toruan, 2020, hal. 116). Keruhnya ketegangan yang terjadi di Laut China Selatan telah berimplikasi pada stabilitas kawasan dan hal ini diinterpretasikan sebagai ancaman bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, khususnya Australia (Perdana, Ramasandi, & Setiawan, 2021, hal. 34-35). Meskipun Australia berada cukup jauh dari Laut China Selatan hal ini tidak mengurangi tendensi negara tersebut untuk berkontribusi dalam rangka

mengimbangi sikap agresif China di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, Australia juga bergantung pada kawasan Indo-Pasifik, maka instabilitas yang terjadi merupakan sebuah tantangan yang harus diselesaikan oleh negara tersebut.

Pembentukan aliansi pertahanan AUKUS mengindikasikan bahwa kerjasama yang dijalin dengan Indonesia belum memberikan kontribusi yang signifikan. Selain itu, Indonesia juga kembali mendapat tantangan sebagai negara sentral yang ada di kawasan Indo-Pasifik, khususnya di Asia Tenggara. Implementasi IA-CSP dapat terpengaruh dengan keikutsertaan Australia pada aliansi pertahanan AUKUS. Melalui siaran pers Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia menyayangkan keputusan Australia untuk membentuk aliansi pertahanan baru di kawasan Indo-Pasifik (Kemlu RI, 2021b).

Indonesia merespon keikutsertaan Australia pada aliansi pertahanan AUKUS dengan sangat berhati-hati. Beberapa poin yang menjadi kewaspadaan Indonesia terkait adanya AUKUS diantaranya adalah adanya aliansi pertahanan di Indo-Pasifik dapat memicu perlombaan senjata. Kemudian kapal selam bertenaga nuklir yang akan dimiliki Australia dapat mengganggu implementasi perjanjian non proliferasi nuklir atau NPT dan tidak sejalan dengan komitmen kawasan Asia Tenggara yang bebas senjata nuklir. Selanjutnya adalah komitmen Australia untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan. Terakhir adalah kepatuhan akan hukum internasional yang salah satunya adalah UNCLOS 1982 (Kemlu RI, 2021b). Poin-poin yang telah dijabarkan sebelumnya tentu memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi implementasi IA-CSP yang telah diresmikan sebelumnya.

IA-CSP sendiri dibentuk atas dasar stabilitas kawasan yang sama-sama menjadi orientasi politik internasional kedua negara. IA-CSP yang diresmikan kedua negara memiliki orientasi pada stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik yang tengah menjadi arena perebutan pengaruh dari negara-negara besar (The Diplomat, 2020a). Kehadiran AUKUS tentu menjadi perhatian bersama bagi kedua negara. AUKUS memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi kemitraan strategis Indonesia dengan Australia. Kedua negara bertemu pada 9 September 2021 dalam agenda 2+2 meeting yang menghadirkan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan masing-masing negara di Jakarta. Pada pertemuan tersebut, pembahasan mengenai komitmen implementasi IA-CSP yang telah disepakati sejak 2018 terus diutamakan (Minister for Foreign Affairs, 2021). Namun, pembahasan terkait pembentukan aliansi pertahanan AUKUS oleh Australia sama sekali tidak dipaparkan pada pertemuan tersebut (Julienne, 2021, hal. 2). Hal ini menyebabkan keraguan dari Indonesia atas sikap Australia terkait komitmen IA-CSP yang mengedepankan pendekatan inklusif berbasis dialog dan forum untuk mengurai isu-isu strategis dalam cakupan kawasan Indo-Pasifik.

Adanya ketidakselarasan antara pembentukan aliansi pertahanan AUKUS dengan komitmen IA-CSP dapat menimbulkan perbedaan pandangan terhadap suatu isu yang sama bagi kedua negara. Pada praktiknya, kemitraan strategis dibangun atas kesamaan visi dan nilai dari dua atau lebih negara yang bekerjasama (Moraes, 2015, hal. 72). Dalam konteks IA-CSP ini, beberapa pilar khususnya pilar ketiga dan pilar kelima dari kemitraan tersebut tentu akan mempengaruhi persepsi kedua negara terhadap isu yang sama. pilar ketiga dan pilar kelima pada IA-CSP

menyangkut soal keamanan bersama serta stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Berdasarkan dua pilar tersebut, Indonesia dan Australia perlu menyamakan visi dan nilai untuk dapat mewujudkan orientasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pembentukan aliansi pertahanan AUKUS tentu mempengaruhi dua pilar tersebut secara tidak langsung. Pembentukan aliansi pertahanan AUKUS berpotensi mengganggu stabilitas kawasan Indo-Pasifik yang sekarang sudah semakin tidak terkendali dengan adanya *great power politics* atau perebutan pengaruh dari negara-negara besar. Selain itu, aliansi pertahanan AUKUS akan membekali Australia dengan sejumlah instrumen pertahanan, yang salah satunya adalah kapal selam bertenaga nuklir. Program ini akan menyulut permasalahan lain yaitu komitmen Australia terhadap *Non-Proliferation Treaty* yang mengatur tentang penggunaan nuklir untuk kepentingan damai. Selain itu, program kapal selam nuklir juga tidak sejalan dengan *Treaty of Amity and Cooperation* yang telah lama menjadi landasan kemitraan ASEAN-Australia, dimana Indonesia sendiri merupakan salah satu negara pemimpin di ASEAN (Association of Southeast Asian Nations, 2012).

Aliansi pertahanan AUKUS yang baru saja diresmikan tentu memberikan respon instan dari Indonesia. Terlebih implementasi IA-CSP hingga saat ini belum dapat dikatakan memuaskan. Aliansi pertahanan AUKUS memiliki potensi untuk menjadi peluang bagi kedua negara. Hal ini merupakan konsekuensi dari kompleksnya perkembangan kawasan Indo-Pasifik yang dipengaruhi oleh aktivitas negara-negara besar. Baik rivalitas China dengan AS, serta peran negara-negara *middle power* seperti Indonesia dan Australia telah mendorong kawasan ini sebagai



salah satu kawasan yang paling dinamis di abad ke-21 (Montratama, Rekonstruksi Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Indo-Pasifik Abad ke-21, 2016, hal. 36). Implementasi IA-CSP dapat dimaksimalkan oleh Indonesia untuk menjadi strategi dalam meredam instabilitas di kawasan Indo-Pasifik sekaligus meningkatkan kemitraan Indonesia dengan Australia pasca dibentuknya aliansi pertahanan AUKUS.

Isu ini penting untuk dikaji karena menyangkut kepentingan Indonesia pada kawasan Indo-Pasifik serta hubungan bilateralnya dengan Australia. Selain itu, kemitraan strategis antara Indonesia dan Australia melalui IA-CSP merupakan hal yang perlu untuk ditingkatkan. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk analisis tentang bagaimana implementasi kemitraan strategis Indonesia dan Australia pasca pembentukan aliansi pertahanan AUKUS. Penelitian ini disusun dengan melihat pola-pola hubungan kedua negara yang telah terjalin sejauh ini. Penulis mengamati dengan adanya aliansi pertahanan AUKUS, implementasi IA-CSP sedikit banyaknya akan mengalami penyesuaian dengan kondisi yang ada. Hal ini berkaitan dengan persepsi kedua negara yang berbeda dalam mengelola stabilitas keamanan pada level kawasan. Argumentasi yang dikemukakan dalam penelitian ini berkaitan dengan implementasi kemitraan strategis Indonesia dan Australia dalam IA-CSP setelah dibentuknya aliansi pertahanan AUKUS oleh Australia. Kedua negara perlu untuk mengkaji ulang bagaimana kemitraan mereka berjalan melalui IA-CSP. Kemitraan strategis kedua negara telah terjalin cukup lama sehingga potensi-potensi yang dapat mengganggu keberlangsungan tersebut harus diatasi semaksimal mungkin. Kedua negara juga memiliki peran yang cukup sentral

pada level kawasan sehingga membutuhkan sikap kooperatif dan komitmen yang tinggi untuk dapat mengelola stabilitas kawasan.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Dari uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas. Penelitian ini berusaha menjawab sebuah pertanyaan yakni “Bagaimana implementasi kemitraan strategis Indonesia-Australia pasca pembentukan aliansi pertahanan AUKUS ?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan implementasi kemitraan strategis Indonesia-Australia pasca pembentukan aliansi pertahanan AUKUS.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini antara lain;

1. Memberikan sumbangsih keilmuan, khususnya untuk Ilmu Hubungan Internasional.
2. Membantu menganalisis fenomena kemitraan strategis dalam lingkup hubungan internasional dengan menggunakan kemitraan strategis antara Indonesia dan Australia sebagai contoh.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis yang penulis harapkan dari penelitian ini sebagai berikut;

1. Menjadi sumber literatur bagi penelitian dengan tema serupa di masa yang akan datang.
2. Menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri melakukan analisis terhadap kawasan dan kemitraan Indonesia dengan Australia.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini merupakan bagian paling awal dari sistematika penulisan. Bab ini berisikan beberapa subbab. Pertama adalah subbab latar belakang masalah, dalam bagian ini diuraikan permasalahan-permasalahan terkait fokus penelitian yang akan dikembangkan. Kedua, subbab pertanyaan penelitian yang akan merangkum latar belakang penelitian menjadi sebuah pertanyaan penelitian. Ketiga, tujuan penelitian yang memberikan gambaran terkait apa yang hendak dicapai dari penelitian ini. Keempat, manfaat penelitian yang dibedakan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **Bab II: Tinjauan Pustaka**

Bab kedua ini berisikan literatur-literatur yang mendukung argumentasi penelitian. Bab ini diisi oleh subbab penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual serta alur pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **Bab III: Metodologi Penelitian**

Bab ini berisikan metode apa yang penulis gunakan untuk merancang sebuah penelitian. Dalam bab ini berisikan beberapa subbab. Subbab tersebut

adalah paradigma penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik keabsahan data.

#### **Bab IV: Pembahasan**

Bab ini berisi analisis dan argumentasi penulis terhadap permasalahan penelitian. Dalam bab ini akan mencangkup beberapa subbab yang disusun sesuai dengan alur pemikiran yang sudah disajikan pada bab sebelumnya.

#### **Bab V: Penutup**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis merumuskan kesimpulan yang telah dianalisis pada bab sebelumnya sekaligus menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Penulis juga merumuskan saran sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

